

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada BAB IV, maka peneliti memperoleh sebuah kesimpulan pada penelitian ini, adalah:

- a. Pada tahap *define problems*, media ini mendefinisikan masalah utama sebagai kegagalan negara dalam merespons aspirasi publik secara substantif. Negara digambarkan tidak mampu atau tidak bersedia menyentuh akar persoalan, sehingga memilih langkah-langkah simbolik seperti dialog dengan perwakilan yang dipertanyakan legitimasinya, pengelolaan citra melalui reshuffle kabinet, hingga kriminalisasi kritik. Sementara itu, masyarakat sipil dan massa demonstran tidak didefinisikan sebagai pelaku utama kekacauan, melainkan sebagai subjek yang bereaksi terhadap kondisi struktural yang timpang.
- b. Pada tahap *diagnose causes*, sumber masalah diarahkan pada faktor-faktor struktural, seperti lemahnya reformasi institusi, dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan politik, kegagalan negara mengelola perang informasi, serta kecenderungan aparat memandang kritik publik sebagai ancaman. Penyebab peristiwa tidak dilokalisasi pada tindakan individu atau massa, tetapi pada sistem kekuasaan dan pola relasi negara dengan masyarakat.
- c. Pada tahap *make moral judgement*, Diskursus Network secara konsisten memberikan penilaian moral negatif terhadap tindakan negara yang dianggap tidak empatik, represif, dan mengabaikan prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, masyarakat sipil dan tuntutan 17+8 dinilai sebagai suara yang sah dan perlu dikawal dalam kerangka demokrasi. Penilaian moral ini mempertegas posisi media sebagai aktor yang berpihak pada nilai keadilan, hak asasi manusia, dan reformasi institusional.
- d. Pada tahap *treatment recommendation*, solusi yang ditonjolkan dalam keempat episode tidak bersifat teknokratis atau jangka pendek. Media ini secara konsisten mendorong reformasi struktural terhadap institusi politik, hukum, dan keamanan, peningkatan literasi publik, pemulihan ruang sipil, serta keberanian politik untuk memutus mata rantai oligarki. Pergantian personel atau pendekatan simbolik tidak diposisikan sebagai solusi yang memadai.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Diskursus Network secara konsisten membingkai Demonstrasi Agustus 2025 bukan sebagai peristiwa *chaos*, gangguan keamanan, atau pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai respons rasional masyarakat terhadap akumulasi ketidakadilan struktural. Dalam keempat episode yang dianalisis, demonstrasi dan tuntutan rakyat 17+8 diposisikan sebagai ekspresi krisis legitimasi negara, kegagalan representasi politik, serta menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

penelitian ini menyimpulkan bahwa framing yang dilakukan Diskursus Network secara keseluruhan mengarah bahwa Demonstrasi Agustus 2025 merupakan gejala krisis struktural negara dan demokrasi, serta menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan.

5.1 Saran

Adapun saran yang menjadi kerangka acuan bagi subjek penelitian agar mampu melakukan evaluasi. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian, saran ini dapat dijadikan referensi untuk para peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan framing media alternatif seperti podcast dengan media arus utama, agar dapat melihat perbedaan konstruksi realitas yang dibangun terhadap isu demonstrasi dan konflik politik. Selain itu, pendekatan metodologis lain seperti analisis wacana kritis atau resepsi audiens dapat memperkaya pemahaman tentang dampak framing media terhadap opini publik.
2. Untuk media, khususnya media digital berbasis diskusi seperti podcast, diharapkan terus mempertahankan konsistensi dalam menyajikan diskursus kritis yang berbasis data dan perspektif yang seimbang. Peran media sebagai ruang dialog publik semakin penting di tengah polarisasi informasi dan penyempitan ruang demokrasi.
3. Pemerintah disarankan untuk tidak memandang kritik dan demonstrasi sebagai ancaman keamanan semata, melainkan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah

dalam sistem demokrasi. Dibutuhkan respons yang lebih empat, transparan, dan berdasar pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

